NEWS Leter

Migrant CARE Media Informasi Buruh Migran Indonesia





Migrant CARE
Media Informasi Buruh Migran Indonesia

Penanggung jawab : Anis Hidayah

Redaktur Pelaksana : Sitti Nurhayati

Anggota Redaksi:

Syaipul Anas Nurharsono Anisa Mutiah

Fotografer : Indah Utami

Redaksi Buletin Migrant CARE mengundang kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat atau gagasan dalam bentuk tulisan (makalah, artikel, esai, features) berkaitan dengan buruh migran di Buletin Migrant CARE. Tulisan juga dimuat di Websit Migrant CARE:

http://www.migrantcare.net

Alamatkan tulisan Anda ke Migrant CARE, Jl. Pulo Asem IC No. 15 RT.15 RW.001 kel. Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur 13220 Telp/Fax: 021-4752803 Email: secretariat@migrantcare.net.

Pengantar Redaksi

uara takbir bertalu menyambut datangnya hari nan fitri, setelah sebulan penuh masyarakat muslim berpuasa. Bagaimana kabarnya buruh migrant Indonesia? Harapan baru semoga mengiringi langkah-langkah kecil tenaga kerja kita diluar negeri dan anggota keluarganya.

Edisi kali ini fokus utamanya mengangkat proses pemberhentian sementara pengiriman (moratorium) tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah pasca banyaknya kekerasan dan hukuman mati tenaga kerja kita disana. Indonesia sudah semestinya lebih tegas dan cepat menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah, karena sudah lama pemerintah Arab Saudi mengindahkan diskriminasi dan tidak adil terhadap buruh migrant kita.

Pemulangan paksa atau program pemutihan tenaga kerja Indonesia dari Malaysia menjadi opini dalam terbitan kali ini. Menarik mengupas proses pemulangan TKI dari Malaysia karena sangat terkait dengan Indonesia yang tidak memiliki strategi untuk memperbaharui relasi dengan Malaysia terkait dengan tenaga kerja kita. Sehingga peristiwa deportasi TKI dari Malaysia menyita perhatian yang serius bagi Negara kita.

Di kilas problematika BMI kita mengangkat persoalan hukuman mati yang semakin hari semakin banyak yang terungkap oleh media. Ada hasil visum Ernawati bt. Sujono PRT di Riyadh asal Kudus yang berbeda dari pusat forensic RSCM dan Riyadh. Selanjutnya kami mengangkat hasil kunjungan tim Advokasi Ruyati ke Arab Saudi.

Pernyataan sikap kita menampilkan pernyataan bersama Migrant Care bersama elemen Civil Society yang memprotes keras atas pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Raja Saudi Arabia di Bidang Kemanusiaan dan Iptek. Masih sering terjadi pelanggaran HAM disana dimana kekerasan dilakukan secara sistematis seperti penyiksaan, pelecehan seksual, pembunuhan, dan hukuman mati, hingga kini belum berakhir maka masyarakat Indonesia merasa terhina atas pemberian gelar tersebut.

Demikian rangkaian berita yang bisa kita hadirkan untuk komunitas buruh migrant dan pemerhati Tenaga Kerja Indonesia. Selamat membaca!!!

> Salam, Redaksi

Daftar Isi

Pengantar Redaksi

- 4. Fokus Utama
 Moratorium setengah hati
- 6. **Opini Kita** Pemulangan TKI dari Malaysia
- 8. Kilas Problematika Buruh Migran Kita Ancaman hukuman mati
 - Profile BMI

13.

Statement Migrant CARE Pernyataan Sikap Bersama Proses Keras atas Pemberian Gelar Dokter Honoris Cuasa kepada Raja Saudi Arabia di Bidang Kemanusiaan dan Iptek

Kilas Problematika Buruh Migran Kita

Ancaman hukuman mati



Profile BMI



Darsem dan Anaknya



Fokus Utama Moratorium

Moratorium setengah hati

Opini Kita



Pemulangan TKI dari Malaysia

Statement Migrant CARE



Pernyataan Sikap Bersama Proses Keras atas Pemberian Gelar Dokter Honoris Cuasa kepada Raja Saudi Arabia di Bidang Kemanusiaan dan Iptek

Moratorium Setengah Hati

Wahyu Susilo dari Migrant CARE menyatakan, Pola penempatan TKI di Arab Saudi yang diserahkan kepada pihak swasta harus diakhiri, karena menyebabkan TKI tidak bisa dilindungi"



emerintah Republik Indonesia sudah memberlakukan pemberhentian sementara tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi sejak tanggal 1 Agustus 2011. Walaupun Indonesia lamban bahkan bisa dikatakan kalah lagi dalam berdiplomasi secara sejajar dengan pemerintah Arab Saudi yang telah memberlakukan penghentian pemberian visa kerja kepada pekerja domestik asal Indonesia sejak tanggal 2 Iuli 2011.

Moratorium ini diberlakukan tanpa batasan yang jelas sampai kapan, yang jelas Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan sampai tercapai kesepakatan bersama atau MOU (memorandum of understanding) antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia.

Banyak kalangan merasa pantas dan seharusnya Indonesia lebih beradi melakukan penghentian tenaga kerja kita ke Arab Saudi setelah kejadian hukuman mati yang di alami ibu Ruyati beberapa bulan yang lalu.

Wahyu Susilo dari Migrant CARE menyatakan "Pola penempatan TKI di Arab Saudi yang diserahkan kepada pihak swasta harus diakhiri, karena menyebabkan TKI tidak bisa dilindungi. Selanjutnya Wahyu Susilo meminta pemerintah untuk tidak mengirimkan TKI ke Arab Saudi karena selama ini tidak perlindungan memberikan terhadap TKI sektor domestik. Pemerintah perlu mengembangkan pasar tenaga kerja ke Negara lain yang memiliki aturan untuk melindungi TKI.

Pasca pemberlakuan maratorium

Banyak PJTKI yang merumahkan pekerjanya dan merasa rugi dengan adanya moratorium pemberlakuan tidak ada lagi pemasukan karena pendapatan dari Negara petro dollar tersebut dari bisnis pengiriman tenaga kerja Indonesia.

Kalau sudah begini siapa yang dirugikan?

Menurut analisis saya pertama, TKI yang sudah siap diberangkatkan yang jumlahnya tidak kurang dari ribuan orang. Menurut data dari BNP2TKI ada 15,000 - 20,000 orang yang setiap bulannya mencari kerja ke Arab Saudi. pemerintah berhenti pemikiran yang penting sudah ada pemberlakuan penghentian sementara tenaga kerja kita ke luar negeri, tanpa juklak dan juknis dan aksi nyata yang jelas tentang langkah-langkah mengatasi akibat moratorium maka akan terjadi bencana bagi dunia kerja atau perburuhan Indonesia. Sementara

angkatan kerja Indonesia masih banyak yang tidak tertampung di perusahaanperusahaan lokal, dimana jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya.

Kedua, PJTKI karena merumahkan pegawainya. Kalau dia kreatif dan bisa mengalihkan calon-calon tenaga kerja Indonesia ke Negara lain yang Negara tujuan memiliki sistem perlindungan terhadap tenaga kerja kita pasti tidak rugi-rugi amat.

Ketiga, pemerintah Indonesia pada umumnya, makin berkurangnya jumlah remiten dari tenaga kerja kita yang berada di luar negeri. Dan ini menandakan berkurangnya devisa (pendapatan) Negara. BI mencatatatkan sampai mei 2011 nilai remittance sebesar US\$ 559. 39 Juta. Gubernur BI Darmin Nasution menuturkan (1/8) bahwa "Potensi devisa TKI diluar negeri per Juni 2011 berjumlah 44.241. Nilai remittance tersebut berasal dari TKI di kawasan Asia sebesar 57.5% terutama Malaysia dan Timur Tegah, Afrika 40,3%, sedangkan Eropa dan Amerika Serikat 2.1%.".

Pasca moratorium diberlakukan teman wartawan dari Trimunnews. com menemukan beberapa calon TKI di Bandara Sukarno Hatta yang siap diberangkatkan dengan tujuan Arab Saudi (6/8/2011). Inilah realitas yang ada saat ini. Kalau pihak depnakertrans

tidak segera menindak tegas PJTKI yang masih mengirimkan dan akan memberangkatkan TKI ke Arab Saudi. Maka dikuatirkan moratorium berjalan setengah hati dan kembali akan merugikan TKI kita, karena tidak adanya jaminan perlindungan bagi tenaga kerja kita dari Negara Arab Saudi.

Setidaknya ada empat langkah yang sering diungkap media yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia:

Pertama, Mengirimkan kerja Indonesia ke Negara lain yang tidak diberlakukan moratorium, Kedua, Pemerintah melalalui kementerian tenaga keria akan mengoptimalkan CSR dari BUMN untuk pemberdayaan calon TKI. Ketiga, Mengalokasikan dana beberapa kementerian (Perindustrian, Menakertrans, Menteri soasial untuk TKI. Keempat, mengoptimalkan dana **PMPM** pemberian pada kantong-kantong daerah yang banyak mengirimkan TKI ke luar negeri seperti ; Jawa Timur, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Masyarakat dan kalangan LSM yang berkomitmen terhadap isu TKI hendaknya turut aktif mengawasi kinerja pemerintah yang banyak menggelontorkan dana triliunan untuk dan atas nama pemberdayaan dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia. (Mus. R)

Pemulangan TKI dari Malaysia



Malaysia benaremerintah benar merealisasikan program pemutihan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di sana. Sekitar dua juta tenaga asing akan terkena program pemutihan tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, tenaga kerja asing yang bekerja di Malaysia banyak dari India, Indonesia, Bangladesh dan sebagainya. Tulisan ini akan fokus pada peristiwa pemulangan tenaga kerja Indonesia dari Malaysia tahun ini.

Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipulangkan dari Malaysia dianggap illegal (tak berdokumen) atau over stayer di sana. Tanggal 28 Agustus sebanyak 1, 300 TKI baik yang legal maupun non illegal telah tiba di Indonesia, 800 di pulangkan di Tanjung Perak, Surabaya sisanya melanjutkan di Tanjung Priok Jakarta (berita,liputan6).

Pemulangan serupa pernah terjadi pada tahun 2002, sebanyak 30 ribu TKI di usir paksa dari Malaysia. Dari segi jumlah yang akan dipulangkan secara paksa (deportasi) tahun ini jumlahnya lebih banyak, seperti yang sering di lansir oleh beberapa media "Sekitar 150 ribu bahkan 300 ribu (sumber kompas) tenaga kerja Indonesia yang akan terkena pendaftaran, program pemantauan, penguatkuasaan (penegakan hukum) dan pengusiran".

Mayoritas TKI bekerja sebagai buruh diperkebunan kelapa sawit, kuli

bangunan, supir ataupun pekerja rumah tangga di Malaysia. Banyak kisah tragis vang sering dialami oleh tenaga kerja kita disana seperti jam kerja yang melebihi waktu kerja, kekerasan fisik sampai pemerkosaan oleh majikan sering pula dialami oleh beberapa tenaga kerja kita di Malaysia.

Hubungan Malaysia yang kadang mendingin dan kadang menghangat juga sering dirasakan oleh pekerja kita Malaysia cukup memahami bahwa kemiskinan di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah meriah. Ketika projek meningkat artinya pembangunan infrastruktur Malaysia membutuhkan pekerja yang banyak maka akan dibuka pintu Malaysia bagi pekerja Indonesia seluas-luasnya dan Indonesiapun serius untuk tanpa perhatian vang mensejahterakan dan melindungi warganya serta merta siap memasok tenaga yang murah ke Malaysia.

Sehingga kejadian pemulangan paksa warga Negara Indonesia yang bekerja di Malaysia ceritanya akan sama seperti tarik ulur. Ketika Malaysia butuh tenaga kerja murah rekrutment pekerja dari Indonesia sebanyak-banyaknya ketika Malaysia tidak butuh maka ada program pemutihan atau sapu bersih tenaga kerja bermasalah.

Banyak cerita yang dialami oleh tenaga kerja kita selama proses program deportasi dari Malaysia. Bersembunyi, berlari, dipukul, ditendang, dirampok isi dompet oleh pasukan rela menjadi kenangan bagi mereka yang pernah bekerja dan diusir secara paksa oleh kebijakan pemerintah Malaysia yang mementingkan kepentingan negaranya sendiri. Karena Malaysia menganggap atau menjalin hubungan dengan Indonesia tidak pernah setara.

pemutihanpun kita banyak mendapatkan informasi bahwa ada proses pungutan liar yang banyak dialami tenaga kerja kita yang akan mengurus dokumen. Hal ini juga ditegarai oleh KBRI bahwa banyak pihak memanfaatkan program pemutihan itu untuk memeras pekerja khususnya dari Indonesia (Tempo, 5/8/2011). Menurut KBRI berita dari pemerintah Malaysia, biaya pendaftaran untuk pemutihan adalah 35 Ringgit (Rp. 100.000), bagi mereka yang akan kembali bekerja di Malaysia, bagi yang akan pulang ke Negara asal tidak dipungut biaya.

Pada kenyataan dilapangan ditemukan para TKI yang akan pulang ke Indonesia atau mengurus surat-surat resti dipungut biaya sampai 350 Ringgit bahkan lebih. Perwakilan Migrant Care di Malaysia Alex Ong mengungkapkan data untuk pengurusan dokumen pendaftaran saja para calo bisa memungut biaya berkisar 335 sampai 700 ringgit Malaysia (Rp. 941.166,73-1966.617,05). Itu belum biaya mereka yang terkena program pemutihan. Jadi Tidak berlebihan kalau program deportasi pekerja Indonesia dari Malaysia merugikan pekerja Indonesia karena pungutan liar mencapai angka yang sangat fantastic sedikitnya 35 juta dollar AS (sekitar Rp. 297,5 miliar). (Anis).

Kilas problematika Buruh Migran Kita



Ancaman hukuman



mingrant lama care menyuarakan advokasi terhadap TKI, khususnya hukuman mati. Sejak kasus Ruyati mencuat di banyak media, masyarakat semakin mengetahui tentang betapa banyak tenaga kerja Indonesia yang terkena hukuman mati dan sedang dalam tahanan untuk menunggu pemaafan dari keluarga korban ataupun menunggu proses eksekusi oleh peradilan di Negara orang lain tempat mereka mencari nafkah.

Berikut data yang terhimpun Migrant Care terkait kasus hukuman mati baik yang sudah dieksekusi maupun menunggu proses eksekusi.

Negara	Jumlah
Arab Saudi	43 orang
China	22 orang
Malaysia	345 orang
Singapura	2 orang

Adakah nama-nama dibawah ini termasuk saudara. ponakan. anak, tetangga atau mertua anda? Sulaimah, siti Zaenab, Aminah binti H Budi, Suwarni, Darmawati binti Tarjana, Nur Bidayati Ikrimah, Wanipah adalah diantara namanama yang terkena ancaman hukuman mati.

Sumartini binti Manaungi Galisung berasal dari desa Pungkit Moyo Utara-Sumbawa. Diberangkatkan oleh PT. Duta Sapta Perkasa sejak tahun 2007 untuk bekerja di Timur Tengah. Dia dituduh melakukan sihir terhadap anak majikannya yang jelas-jelas tidak terbukti, karena anak majikannya sudah kembali kerumahnya.

Sampai saat ini Sumartini masih ditahan di penjara dan terancam putusan Qishas yang dijatuhkan pengadilan pada Mei 2010, yang melandaskan pada bukti tanda tangan kalau dia benar melakukan sihir dan menurut hukum

di Arab dia melakukan perbuatan kafir. Padahal menurut temannya asal Pacitan yang pernah ditahan bersama di Kabar, ia dipaksa mengaku oleh keluarga majikannya melakukan kesalahan tersebut dengan cara yang cukup keji yakni ditendang, dipukul sampai dibawa ke padang pasir ditanam sampai sebatas leher sampai dia menanda tangani selembar kertas pengakuan palsu yang membawanya pada ancaman hukuman mati.

Kasus Sumartini merebak kembali karena berita meninggalnya TKW Ruyati yang dihukum mati. Sampai saat ini tidak tahu sampai kapan ia berharap cemas untuk dibebaskan dari ancaman hukuman mati karena benar-benar ia tidak melakukan perbuatan sihir terhadap anak majikannya. (Anas)



Kematian Ernawati Bt. Sujono (PRT Migran Indonesia di Saudi Arabia) Sebuah ?

Jenazah Ernawati bt. Sujono asal Ds. Ngeseng Desa Karanrowo Ke. Undaan Kab. Kudus Jawa Tengah telah dipastikan oleh visum di RSCM akibat kekerasan tumpul. Kesimpulan pada mayat yang berumur antara lima belas sampai dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka memar yang tersebar pada daerah wajah, dada, kedua lengan dan lutut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya didapatkan pembengkakan dan pendarahan pada paru-paru yang sebagian telah mengalami penyembuhan. Memar akibat kekerasan tumpul pada daerah dada dapat menyebabkan pendarahan pada jaringan paru yang berakhir dengan kematian.

Hal ini mematahkan surat pemberitahuan kementerian luar negeri direktorat jenderal protokol dan konsuler kepada keluarga almarhum Ernawati binti Sujono Kondorin yang menyatakan akibat meninggalnya almarhumah karena akibat mengkonsumsi zat warfirin dengan dosis mematikan yang menyebabkan pendarahan dalam. Keterangan meninggalnya almarhum didasarkan pada hasil medical report forensik yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran Forensik Hail.

Mengapa ada perbedaan hasil jenazah Ernawati? adakah data yang ditutupi oleh KBRI Riyadh mengenai kekerasan dan penganiayaan almarhumah?. Saat ini pihak keluarga meminta pertanggungjawaban pemerintah Indonesia atas kelalaian dan kelambanan melakukan langkah penyelamatan menindaklanjuti laporan keluarga Ernawati Bt. Sujono. Selain itu keluarga korban juga menuntut pertanggung jawaban semua pihak untuk memenuhi hak-hak almarhumah. (Ely)

Investigasi Tim Advokasi Ruyati dan TKI Arab Saudi





Aliansi sipil masyarakat untuk advokasi perlindungan dan TKI melakukan kunjungan dan investigasi kasus meninggalnya Ruyati binti Satubi vang meninggal karena hukuman pancung di Arab Saudi (11-20/8/2011). Tim advokasi masyarakat sipil terdiri dari perwakilan ormas dan LSM yakni;

- 1. Een Nuraenah (putri Ruyati)
- 2. Nining Johar (Migrant CARE)
- 3. Ala'I Nadjib (Alimat/Fatayat)
- 4. Bima (Media)
- 5. Badrus Samsul Fata (Wahid Institute)

Tim melaporkan beberapa temuan selama investigasi ke Arab Saudi.

Pertama, Dalam perjalanan di pesawat yang kami tumpangi berjumpa dengan 5 orang TKW yang akan bekerja di Arab Saudi, padahal saat itu masa moratorium di berlakukan. Walaupun moratorium antara Arab Saudi dan Indonesia kami pandang memang tidak akan optimal, karena realitasnya beberapa PJTKI mengantongi visa blok yang bisa digunakan untuk memberangkatkan calon tenaga kerja asal Indonesia.

Kedua, Makam Ruyati Binti Satubi tidak benar di Ma'la. Sebenarnya adalah di pemakaman Sara'i 15 menit dari pemakaman Ma'la (makam siti Khodijah as). Tepatnya di pemakaman kavling/blok 25 no urut ke 7 dari sisi kanan dan ke 3 dari belakang. No 350.

Ketiga, Misteri terbunuhnya Ruyati. Walaupun banyak media mengabarkan bahwa pemerintah Arab Saudi terlambat mengkomunikasikan tentang hukuman qishas yang dijatuhkan pada almarhumah tim tidak berhenti pada alasan klasik yang sering diungkapkan oleh aparatur Negara yang menangani TKI (KJRI, BNP2TKI, dll).

Kami sempat berkomunikasi dengan ketiga majikan Ruvati. Kadua majikan sebelumnya menyatakan heran atas kejadian yang menimpa almarhumah karena mereka Ruvati, mengenal almarhumah sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan kesalahan satu lagi sering membaca al qur'an. Mereka mengungkapkan dengan bahasa Arab "Hiya Mumtaz wa ma fi musykilah...". Kalau selama bekerja (7 thn) di dua majikan sebelumnya almarhumah Ruyati tidak pernah bermasalah, mengapa selama 1 tahun 4 bulan waktu bekerja vang cukup singkat di keluarga Omar Abdullah Omar al-Halwani membuat almarhumah sampai pancung. di Tidakkah ada keganjilan atas kasus yang dialami Ruyati.

kami mengatakan Kevakinan "mengingat peradilan yang diputuskan begitu cepat dan tanpa pembelaan dari pemerintah Indonesia sendiri terhadap kasus Ruvati dan informasi mengenai kondisi fisik terahir ketika dipenjara luka disekujur tubuh sangat mustahil almarhumah bisa melakukan kejahatan terhadap majikannya itu. Membela diri atau menghindar dari penganiayaanpenganiayaan yang selama ini dialami oleh almarhumah selama bekeria di rumah majikan ketiganya itu, merupakan alasan yang sangat masuk akal bagi kami. Mengingat kejadian-kejadian kekerasan vang selama ini sering dialami oleh TKW kita karena relasi kerja yang tidak setara antara majikan dan buruhnya.

Sebuah catatan akhir yang diungkap oleh tim advokasi kasus Ruyati sebagai berikut:

- (1) Mempertanyakan vonis hukuman mati dan ekesekusi yang tanpa memberitahukan secara resmi kepada pemerintah Indonesia. Sehingga, keluarga Ruyati tidak mendapatkan informasi sekali perihal eksekusi sebelum eksekusi dilakukan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip Mandatory Consular Notification (MCN)sebagiamana diatur dalam Konvensi Wiena:
- (2) Hingga hari ini, keluarga Ruyati binti Syatubi belum menerima salinan putusan Mahkamah 'Ula la tentang vonis dan eksekusi mati terhadap Ruyati binti Syatubi. Padahal itu adalah bagian dari hakkeluarga Ruyati. Sehingga, penting bagi keluarga Ruyati untuk mendapatkan salinan vonis dan eksekusi mati dan surat keterangan kematian;
- (3) Keluarga Ruyati meminta agar jenazah almarhumah Ruyati yang sudah dimakamkan untuk bisa dipulangkan ke Indonesia. (*Nining*)

PROFILE BMI

Profil Buruh migrant ini lagi menjadi pemberitaan media beberapa bulan belakangan ini, Darsem bin Dawud yang berasal dari desa Patimban, kecamatan Pusakanagara, kabupaten Subag-Jawa Barat yang terbebas dari hukuman gantung di Arab Saudi.

Darsem dinyatakan terbukti bersalah telah membunuh majikannya, menurut beberapa media Darsem membunuh karena melakukan pembelaan diri ketika akan diperkosa. Pada 6 Mei 2009 Darsem dijatuhi vonis hukuman mati.

Cita-cita Darsem berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2006 tidak lain ingin merubah nasib hidupnya. Sebagai tulang punggung keluarga dengan satu anak yang ditinggal suaminya menikah lagi bertekat mengadu nasib ke Arab Saudi. Namun sayang belum bisa mewujudkan mimpinya, Darsem ditetapkan sebagai orang yang masuk daftar TKW yang terkena hukumam mati.

Setelah berita hukuman mati ruyati semakin berhembus kencang, dan banyak mendapat respon dari berbagai media nasional keluarga Darsem yang seorang nelayan berusaha menemui instansi pemerintah dan DPRD Subang untuk mengupayakan pembebasan terhadap anaknya Darsem.

Walaupun pemerintah telah mengusahakan melobi keluarga majikan Darsem dan mendapatkan pengampunan. pemerintah Tapi Indonesia harus membayar uang



Darsem dan Anaknya

diyat/tebusan sebagai pengganti hukuman sebesar 4,7 Milliar agar Darsem bisa pulang ke tanah air. Simpati masyarakatpun berdatangan untuk menyumbangkan uangnya demi pembebasan Darsem.

Kini Darsem telah berada Kampungnya sejak tanggal 13 Juli 2011, dia berusaha menata mimpinya kembali yang sempat terkoyak. Tapi perjuangan Darsem tidak begitu saja selesai setelah mendapatkan sumbangan dari pemirsa TV-one sejumlah 1,2 M. Dia harus berjuang untuk membuktikan bahwa menjalani lakon hidup harus punya sehingga tidak terombangambing oleh ocehan, berita miring dan keinginan orang lain. Kebanyakan tenaga kerja wanita masih memikul stigma yang sering dialami oleh kebanyakan Tenaga Kerja Indonesia, yakni cap negative seperti TKW lugu, kurang pintar dan suka berfoya-foya. Padahal cap atau label itu tidak selamanya memiliki kandungan kebenaran. (Mus. R)

Statement Migrant CARE

Pernyataan Sikap Bersama

Protes Keras atas Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa kepada Raja Saudi Arabia di Bidang Kemanusiaan dan Iptek



T nam puluh enam tahun genap usia kemerdekaan bangsa ini, namun dak juga membuat kita menjadi

√olumbat bangsa yang bermartabat. Mental yang memperbudak bangsa sendiri menjunjung setinggi-tingginya orang lain yang jelas-jelas tidak menghormati kedaulatan dan martabat bangsa sendiri, sering menjadi ciri wajah elemen bangsa ini. Tak terkecuali kalangan akademisi semestinya menjadi yang dalam perwujudan masyarakat yang lebih beradab. Ironisnya, mental ini ditunjukkan dengan sangat nyata oleh Rektor Universitas Indonesia yang telah

memberikan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Kemanusiaan dan Iptek kepada raja Saudi Arabia, Abdullah.

Bagi masyarakat Indonesia, Saudi Arabia adalah negara yang tidak menghormati hak asasi manusia. Berbagai macam pelanggaran HAM terhadap buruh migran terjadi secara sistematis seperti penyiksaan, pelecehan seksual, pembunuhan, dan hukuman mati, hingga kini belum berakhir. Sudah terlalu banyak warga negara Indonesia yang mengalami penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaannya tanpa ada kebijakan politik yang dapat melindunginya. Masih segar di ingatan kita, pemancungan Ruyati (18/06) yang melanggar norma-norma Internasional. Kondisi yang seperti ini sama sekali tidak terlepas dari pemegang otoritas politik tertinggi, yaitu Raja Abdullah.

Dengan demikian, sungguh Rektor Universitas Indonesia telah mengabaikan nurani bangsa ini yang belum surut dari duka mendalam atas tragedi kemanusiaan yang menimpa warga negara Indonesia di Saudi Arabia.

Bahkan, pemberian gelar Doktor Honoris Causa ini terkesan melecehkan isi pidato Presiden SBY yang -meskipun terlambattetap menyatakan keprihatinan dan marah terhadap sikap penguasa Saudi Arabia tersebut dengan melakukan moratorium pengiriman TKI ke Saudi Arabia atas dasar pelanggaran HAM yang terjadi di Saudi Arabia. Di samping itu, pemberian penghargaan tersebut tidak lazim sebagaimana biasanya; gelar itu tidak diberikan di Universitas Indonesia, namun dihantarkan langsung ke Istana Raja Abdullah di Saudi Arabia.

Untuk itu, dalam rangka menyikapi penganugerahan gelar tersebut, kami, Migrant CARE bersama elemen Civil Society yang peduli terhadap Kemanusiaan, menyatakan sikap sebagai berikut:

- Mengecam dan memprotes Rektor UI yang secara tidak pantas memberikan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Kemanusiaan kepada Raja Abdullah;
- Mendesak Komisi IX dan/atau bersama Komisi X DPR RI untuk memanggil Rektor UI agar dapat memberikan penjelasan terhadap apa yang sesungguhnya menjadi latar-belakang atau barter dari pemberian penghargaan terhormat berlatarbelakang akademis tersebut di tengah keprihatinan terhadap pelanggaran hak-hak kemanusiaan buruh migran Indonesia di Saudi Arabia.

Jakarta, 26 Agustus 2011

Migrant CARE, JALA PRT (Jaringan Advokasi Nasional untuk PRT, beranggotakan 44 organisasi) , INFID, Our Voice, ATKI (ASosiasi Tenaga Kerja Indonesia), PAKUBUMI (Paguyuban Keluarga Buruh Migran Indonesia) , IPMIK (Ikatan Pekerja Migran Kebumen) ,SARI (Social Analysis Research Institute) , Kapal Perempuan, KPI (koalaisi Perempuan Indonesia), Alimat, INDIPT, ICDHRE, LKTS, Sudahi KNTP, dan kawan-kawan Civil Society lain yang memberikan pernyataan secara terpisah.

Halaman Belum Ada isinya Mungkin Bisa diisi dengan Parade Foto

















